

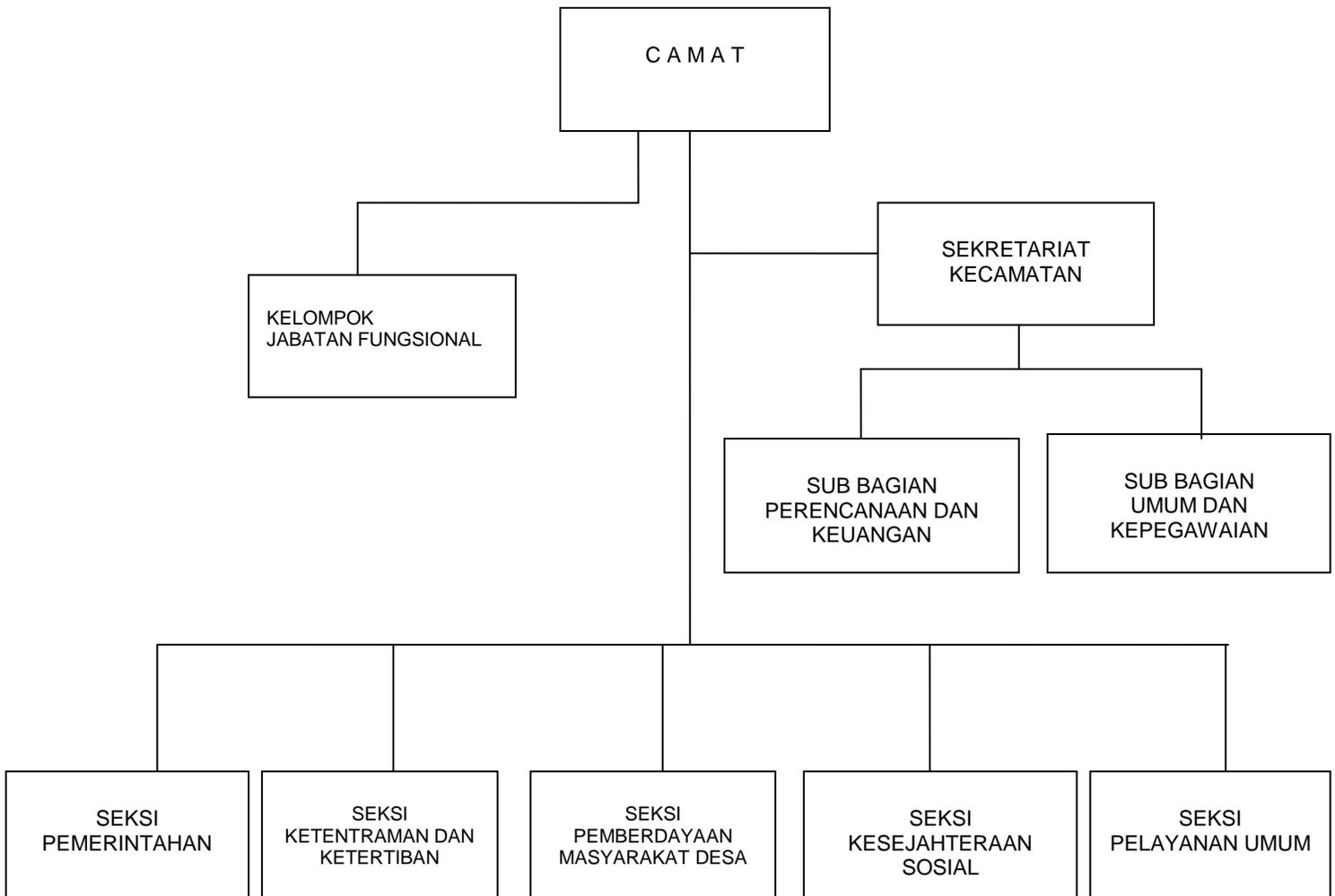
**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN**

**2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Sukolilo**

**2.1.1. Struktur Organisasi Kecamatan**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati nomor 64 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, susunan organisasi Kecamatan Sukolilo terdiri atas:

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
PEMERINTAH KECAMATAN SUKOLILO  
KABUPATEN PATI**



### **2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan**

Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 221 dan pasal 226, serta Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 50 menyebutkan bahwa Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan: koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota; berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan yang bersangkutan. ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota berpedoman pada peraturan pemerintah. Tugas Camat sebagaimana disebutkan dalam regulasi tersebut adalah:

- a. menyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan

i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) UU nomor 23 tahun 2014 yaitu:

- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional;
- d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Di Kabupaten Pati, berdasarkan Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati nomor 63 Tahun 2009 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, berikut disajikan kewenangan yang dilimpahkan kepada kecamatan.

**Tabel II.1.**  
**Urusan yang Dilimpahkan Bupati Kepada Kecamatan**

<b>No</b>	<b>Aspek</b>	<b>Kewenangan yang Dilimpahkan</b>
<b>1</b>	Aspek Rekomendasi	<p>A. Rekomendasi, pencatatan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan lahan bekas jalan kali mati.</p> <p>B. Rekomendasi dan pengawasan ijin pendaftaran Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang social, organisasi social/panti social, pengumpulan uang di lingkup Kecamatan.</p> <p>C. Rekomendasi pemberian Surat Keterangan domisili kantor/ usaha industri.</p> <p>D. Rekomendasi pemberian ijin usaha, pengawasan dan pelaporan tempat usaha pelatihan kerja.</p> <p>E. Rekomendasi pemberian ijin keramaian, ijin gangguan, ijin usaha dan ijin mendirikan bangunan.</p> <p>F. Rekomendasi pencairan Alokasi Dana Desa yang diajukan oleh Pemerintah Desa di Wilayahnya.</p> <p>G. Rekomendasi pencairan Bantuan Keuangan berupa tambahan penghasilan</p>

<b>No</b>	<b>Aspek</b>	<b>Kewenangan yang Dilimpahkan</b>
		<p>aparatus pemerintah desa dan bantuan keuangan bagi anggota badan permusyawaratan desa dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa lainnya yang diajukan oleh pemerintah desa di wilayahnya.</p>
<b>2</b>	Aspek Koordinasi	<p>A. Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai proses pelaksanaan pendaftaran di desa dan kelurahan sesuai kerja Camat.</p> <p>B. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai pelaporan data kependudukan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Desa dan Kelurahan sesuai wilayah kerja Camat.</p> <p>C. Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kecamatan.</p> <p>D. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK skala kecamatan.</p> <p>E. Koordinasi dan pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas) di wilayah kerjanya.</p> <p>F. Koordinasi dan fasilitasi proses/kegiatan pengisian perangkat desa dan pemilihan</p>

<b>No</b>	<b>Aspek</b>	<b>Kewenangan yang Dilimpahkan</b>
		<p>kepala desa.</p> <p>G. Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.</p>
<b>3</b>	Aspek Pembinaan	<p>A. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.</p> <p>B. Pembinaan, pengawasan, fasilitasi Badan Permusyawaratan Desa skala Kecamatan.</p> <p>C. Pembinaan, koordinasi, pengawasan dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa skala kecamatan.</p> <p>D. Pembinaan terhadap kinerja aparat pemerintahan desa baik kepala desa maupun perangkat desa termasuk staf perangkat desa.</p>
<b>4</b>	Aspek Penyelenggaraan	<p>A. Melantik keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan.</p> <p>B. Legalisasi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)</p> <p>C. Meresmikan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan.</p> <p>D. Memberhentikan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan.</p>

<b>No</b>	<b>Aspek</b>	<b>Kewenangan yang Dilimpahkan</b>
		<p>E. Mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan.</p> <p>F. Menerbitkan Keputusan mengenai pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan.</p> <p>G. Menerbitkan Keputusan mengenai pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dan pengesahan anggota Badan Permusyawaratan Desa antar waktu desa di wilayah kerjanya.</p> <p>H. Evaluasi Peraturan Desa tentang APBDes.</p> <p>I. Pembentukan satuan relawan kebakaran (Satlakar) di tiap Kecamatan.</p> <p>J. Pelaksanaan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa ijin yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup.</p> <p>K. Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah Negara, bebas dan tanah timbul di wilayah kerjanya.</p> <p>L. Pendataan ketenagakerjaan di wilayah kerjanya.</p> <p>M. Pengusulan penetapan nama-nama</p>

<b>No</b>	<b>Aspek</b>	<b>Kewenangan yang Dilimpahkan</b>
		<p>geografi.</p> <p>N. Pengusulan penetapan batas wilayah Kecamatan dan batas wilayah antar kelurahan.</p> <p>O. Pelaksanaan lomba desa/kelurahan tingkat kecamatan.</p> <p>P. Koordinator pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pembinaan administrasi pungutan PBB pedesaan dan perkotaan.</p> <p>Q. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.</p> <p>R. Pemungutan Pajak Daerah di luar surat ketetapan Pajak daerah (SKPD).</p>

Sumber: *Lampiran Peraturan Bupati Pati Nomor 4 Tahun 2013*

**Tabel II.2.**

**Kewenangan Program dan Kegiatan SKPD yang Dilimpahkan Kepada Kecamatan**

<b>No</b>	<b>Urusan dan PD yang melimpahkan</b>	<b>Program dan Kegiatan yang dilimpahkan</b>
<b>1</b>	Dinas Koperasi dan UMKM	Pelaksanaan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)
<b>2</b>	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Perizinan IMB, SIUP bagi usaha mikro, TDP bagi usaha mikro, Pengumpulan Dana dan penutupan jalan.
<b>3</b>	Dinas Kependudukan	Pembuatan KTP, KK, Surat Pindah, Surat

	dan Pencatatan Sipil	Keterangan pengganti KTP.
--	----------------------	---------------------------

Sumber: *Sekretariat Kecamatan Sukolilo, 2016*

## 2.2 Sumber Daya Kecamatan

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia

Pegawai Kecamatan Sukolilo berjumlah 22 orang, terdiri dari 16 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 6 (enam) orang Tenaga Kerja Kontrak (TKK). Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel II.3**

**Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan**

No	Uraian	Eselon III		Eselon IV		Staf		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P
<b>1</b>	<b>Kecamatan Sukolilo</b>	<b>2</b>		<b>5</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>6</b>
	Camat	1	-	-	-	-	-	1	
	Sekcam	1	-	-	-	-	-	1	
	Kasubag Program & Keu	-	-	1	-	-	-	1	
	Kasubag Umum & Kepeg	-	-	1	-	-	-	1	
	Kasi PMD	-	-	1	-	-	-	1	-
	Kasi Trantib	-	-	1	-	-	-	1	
	Kasi Kesos	-	-	1	-	-	-	1	
	Kasi Pelayanan	-	-	-	1	-	-	-	1
	Kasi Pemerintahan	-	-	-	1	-	-	-	1
	Staf Pemerintahan	-	-	-	-	1	-	1	-
	Staf Pelayanan	-	-	-	-	1	-	1	-

No	Uraian	Eselon III		Eselon IV		Staf		Jumlah	
	Staf PMD	-	-	-	-	1	-	1	-
	Staf Subbag Umum & Kepegawaian	-	-	-	-	1	1	1	1
	Staf Subbag Program dan Keuangan	-	-	-	-	-	1	-	1
	Satpol PP	-	-	-	-	1	-	1	-
	Tenaga Harian Lepas Kebersihan	-	-	-	-	-	-	-	2
	Tenaga Harian Lepas Keamanan	-	-	-	-	-	-	3	-
	Tenaga Honorer	-	-	-	-	-	-	1	-

Sumber: Sekretariat Kecamatan Sukolilo, 2016

**Tabel II.4**

**Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan**

No	Uraian	<SLTP		SLTA		Diplom a		S1		S2<		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
<b>1</b>	<b>Kecamatan Sukolilo</b>	<b>1</b>		<b>2</b>		<b>1</b>		<b>5</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>4</b>
	Camat	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	Sekcam	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	Kasubag Program & Keu	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	Kasubag Umum & Kepeg	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	Kasi PMD	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	Kasi Trantib	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	Kasi Kesos	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-

No	Uraian	<SLTP		SLTA		Diplom a		S1		S2<		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
	Kasi Pelayanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	Kasi Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	Staf Subag Program	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	Staf Subag Umum dan Kepegawaian	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
	Staf Kasi Pemerintahan	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	Staf Kasi PMD	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	Staf Kasi Kesos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tenaga Harian Lepas	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	3	2
	Honoror	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-

Sumber: Sekretariat Kecamatan Sukolilo, 2016

Kebutuhan sumberdaya manusia berdasarkan kompetensi untuk melaksanakan tugas dan fungsi kecamatan sebagai berikut:

**Tabel II.5**  
**Kebutuhan pegawai dengan kompetensi khusus**

No	Kompetensi	Kebutuhan	Yang Tersedia
1	1. Pengolah data dan penyaji data	1	0
	2. Administrasi Keuangan	1	0

	3. Pengadministrasi Umum	1	0
--	-----------------------------	---	---

### 2.2.2. Sarana Dan Prasarana Kerja

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Kecamatan.

**Tabel II.6**  
**Sarana Prasarana Kecamatan**

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Kondisi Saat ini	Keterangan
1	Gedung	4	Unit	Baik	Kantor,Aula, Rumah Dinas, mushola
2	Ruangan	8	Ruangan	Baik	
3	Kendaraan roda 4	1	Unit	Baik	
4	Kendaraan roda 2	7	Unit	4 Baik, 3 kurang baik	
5	peralatan kerja - Komputer - Laptop - Printer	4 4 4	Set Set Set	3 Baik, 1 rusak Baik 2 baik , 2 rusak	
6	Almari	6	unit	Baik	
7	AC	6	unit	Baik	

8	Filling cabinet	7	Unit	Baik	
9	Sound system	1	set	baik	

*Sumber: Sekretariat Kecamatan Sukolilo, 2016*

Kondisi jumlah AC di Kecamatan Sukolilo saat ini sebanyak 6 unit dengan kondisi baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan AC sebanyak 2 unit lagi untuk 2 ruangan yang belum terdapat AC.

Kondisi jumlah almari di Kecamatan Sukolilo saat ini sebanyak 6 unit dalam kondisi baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan almari sebanyak 5 unit lagi untuk tempat arsip dan penggantian almari yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah filling cabinet di Kecamatan Sukolilo saat ini sebanyak 7 unit dalam kondisi baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan filling cabinet sebanyak 5 unit lagi untuk pejabat struktural yang belum punya filing cabinet dan penggantian filing cabinet yang kurang baik dan rusak.

Mengingat pejabat struktural sebanyak 9 orang dan petugas PBB 1 orang sementara kendaraan operasional yang tersedia sebanyak 8 unit termasuk mobil maka kedepan pemerintah kecamatan masih membutuhkan penambahan kendaraan operasional sebanyak 4 unit dikarenakan 1 unit motor untuk pejabat yang belum dapat motor dan 3 unit motor untuk penggantian motor yang sudah kurang baik.

Kondisi jumlah komputer di Kecamatan Sukolilo saat ini sebanyak 4 unit dengan 3 dalam kondisi baik dan 1 kondisi kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan komputer sebanyak 3 unit lagi untuk pelayanan dan penggantian komputer yang kurang baik.

Kondisi jumlah Laptop di Kecamatan Sukolilo saat ini sebanyak 5 unit dengan 4 dalam kondisi baik dan 1 kondisi kurang baik, mengingat pejabat struktural sebanyak 8 orang dan 2 untuk simda keuangan dan simda BMD (aset) maka ke depan masih membutuhkan penambahan

laptop sebanyak 7 unit lagi untuk 8 pejabat dan penggantian laptop yang kurang baik.

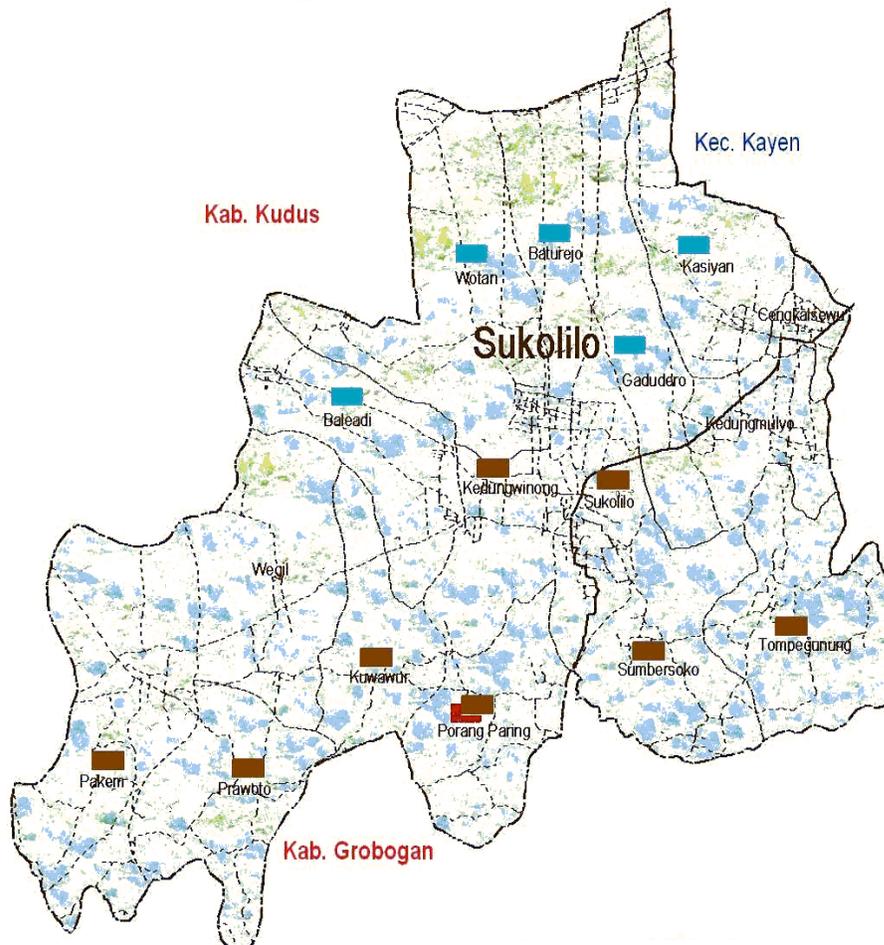
Kondisi jumlah printer di Kecamatan Sukolilo saat ini sebanyak 4 unit dengan 2 dalam kondisi baik, 2 kondisi kurang baik dan 1 kondisi rusak, maka ke depan masih membutuhkan penambahan printer sebanyak 8 unit lagi untuk pelayanan dan penggantian printer yang kurang baik dan rusak.

### **2.2.3. Kondisi umum Kecamatan Sukolilo**

#### **2.2.3.1. Kondisi Kewilayahan**

Kecamatan Sukolilo merupakan salah satu bagian wilayah Kabupaten Pati dengan memiliki luas lahan sebesar 15,874 Ha. Secara administratif Kecamatan Sukolilo dibatasi oleh :

- Bagian Selatan : Kabupaten Grobogan
- Bagian Utara : Kecamatan Kayen Kabupaten Pati
- Bagian Timur : Kabupaten Grobogan
- Bagian Barat : Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus



Kawasan perencanaan yang menjadi lingkup kerja Kecamatan Sukolilo dapat dilihat dalam tabel II.7 berikut ini :

**Tabel II.7**  
**Kawasan Perencanaan di Lingkup Kecamatan Sukolilo**

No	Desa	Luas Wilayah (ha)	Jml RT	Jml RW	Peruntukan Kawasan Pengembangan Khusus menurut RTRW Kab. Pati
1	Pakem	758	37	6	Pertanian lahan bukan sawah

No	Desa	Luas Wilayah (ha)	Jml RT	Jml RW	Peruntukan Kawasan Pengembangan Khusus menurut RTRW Kab. Pati
2	Prawoto	1.773	54	6	Pertanian
3	Wegil	1.441	30	4	Pertanian
4	Kuwawur	381	25	4	Pertanian lahan bukan sawah
5	Porangparing	718	15	4	Pertanian lahan bukan sawah
6	Sumbersoko	722	16	2	Pertanian lahan bukan sawah
7	Tompegunung	747	22	5	Pertanian lahan bukan sawah
8	Kedumulyo	777	30	5	Pertanian,tambang,ekowisata
9	Gadudero	920	18	2	Pertanian,tambang
10	Sukolilo	941	59	10	Pertanian, perdagangan
11	Kedungwinong	752	33	4	Pertanian,tambang
12	Baleadi	1.818	34	9	Pertanian
13	Wotan	2.257	46	7	Pertanian
14	Baturejo	1.024	23	4	Pertanian
15	Kasiyan	622	13	3	Pertanian
16	Cengkalsewu	223	22	6	Pertanian

Sumber: Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabuapten Pati , 2011

### 2.2.3.2. Keadaan penduduk

Kecamatan Sukolilo memiliki jumlah penduduk sebanyak 84.791 jiwa, yang terdiri dari 37.014 jiwa laki-laki dan 47.777 jiwa perempuan. Jumlah kepala keluarga (KK) di Kecamatan Sukolilo tahun 2016 berjumlah 29.059 KK. Berdasarkan data kependudukan dari kecamatan pada tahun 2016 yang dilihat kepadatan penduduk sebesar 570 jiwa per

hektar. Profil kependudukan Kecamatan Sukolilo digambarkan melalui tabel berikut:

**Tabel II.8**  
**Jumlah Penduduk menurut Struktur Umur di Kecamatan Sukolilo**  
**Tahun 2012-2016**

No	Kelompok Umur (tahun)	L (Orang)	%	P (Orang)	%	Jumlah (Orang)	%
1	0-4	3.883	4,28	4.672	5,16	8.555	9,45
2	5-9	4.434	4,89	4.231	4,67	8.665	9,57
3	10-14	4.906	5,42	4.818	5,32	9.724	10,74
4	14-24	6.911	7,63	7.054	7,79	13.965	15,42
5	25-34	6.212	6,86	6.073	6,71	12.285	13,56
6	35-44	5.206	5,75	5.195	5,74	10.401	11,48
7	45-54	5.206	5,32	4.928	5,44	9.746	10,76
8	55-64	4.952	5,47	4.899	5,41	9.851	10,88
9	65+	3.738	4,13	3.637	4,02	7.375	8,14

*Sumber: Sekretariat Kecamatan Sukolilo, 2016*

Sumber daya manusia berdasarkan tingkat pendidikan di Kecamatan Sukolilo sebagai berikut:

**Tabel II.9**  
**Jumlah Penduduk menurut Pendidikan di Kecamatan Sukolilo**

**Tahun 2012-2016**

No	Pendidikan	Jumlah	%
1	Belum Sekolah	33.126	39,07
2	Tidak tamat SD/ Sederajat	14.411	17,00
3	Tamat SD/ Sederajat	19.271	22,73
4	Tamat SLTP/Sederajat	10.586	12,48
5	Tamat SLTA/ Sederajat	5.987	7,06
6	Diploma	560	0,66
7	Sarjana	850	1,00
8	Buta huruf	-	

Sumber: Data Dispendukcapil Kabupaten Pati, 2016

Profil penduduk menurut jenis pekerjaan di Kecamatan Sukolilo sebagai berikut

**Tabel II.10****Profil Penduduk menurut Jenis Pekerjaan di Kecamatan Sukolilo**

No	Jenis Pekerjaan	L	P	jumlah	%
1	Belum/tidak bekerja	13.501	12.219	25,270	30,33
2	Mengurus rumah tangga	7	7.334	7.341	8,66
3	Pelajar/mahasiswa	3.722	2.862	6.584	7,76
4	Pensiunan	61	11	72	0,08
5	PNS	223	111	334	0,39
6	TNI	16	2	18	0,02
7	Polri	27	0	27	0,03
8	Pedagang	245	729	974	1,15
9	Petani/pekebun	8.039	7,344	6.548	18,14

No	Jenis Pekerjaan	L	P	jumlah	%
10	Peternak	9	2	11	0,01
11	Nelayan	2	1	3	0,01
12	Industri	5	6	11	0,01
13	Konstruksi	32	0	32	0,04
14	Transportasi	19	0	19	0,02
15	Karyawan swasta	843	604	1.447	1,71
16	Karyawan BUMN	7	3	9	0,01
17	Karyawan BUMD	9	1	10	0,01
18	Karyawan Honoror	28	19	47	0,06
19	Buruh harian lepas	84	66	150	0,18
20	Buruh tani	883	847	1.730	2,04
21	Wiraswasta	13.913	9.201	23.114	27,26

Sumber: Data Dispendukcapil Kabupaten Pati, 2016

Profil penduduk menurut agama di Kecamatan Sukolilo sebagai berikut

**Tabel II.11**

**Profil Penduduk menurut Jenis Agama di Kecamatan Sukolilo**

No	Agama	L+P	%
1	Islam	84.245	99,36
2	Kristen Protestan	416	0,49
3	Katholik	6	0,01
4	Hindu	-	-
5	Budha	16	0,02
6	Konghuchu	-	-
7	Aliran kepercayaan	108	0,13
	Jumlah	84.791	100

Sumber: Data Dispendukcapil Kabupaten Pati, 2016

## **2.3 Kinerja Pelayanan SKPD**

### **2.3.1. Kinerja Pelayanan**

Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 221 dan pasal 226, serta Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 50 menyebutkan bahwa Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan: koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. Perda Kabupaten Pati nomor 13 tahun 2016 mengatur tugas dan fungsi kecamatan, yang menjadi batasan area pengukuran kinerja pelayanan kecamatan. Kewenangan kecamatan juga ditambahkan berdasarkan Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati nomor 63 Tahun 2009 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati. Dengan demikian kinerja pelayanan Kecamatan Sukolilo didasarkan pada tugas dan fungsi dan pelimpahan kewenangan tersebut.

A. Mewujudkan masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah Kecamatan

#### 1. Angka Kriminalitas

Salah satu tugas kecamatan yaitu mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum. Terkait dengan angka kriminalitas yang terjadi di Kecamatan Sukolilo dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel II.12**  
**Angka Kriminalitas di Kecamatan Sukolilo**

<b>No</b>	<b>Jenis Kriminal</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>1</b>	Jumlah kasus narkoba	NA	NA	NA	0	0
<b>2</b>	Jumlah kasus pembunuhan	NA	NA	NA	0	0
<b>3</b>	Jumlah kejahatan seksual	NA	NA	NA	0	0
<b>4</b>	Jumlah kasus penganiayaan	NA	NA	NA	10	5
<b>5</b>	Jumlah kasus pencurian	NA	NA	NA	6	9
<b>6</b>	Jumlah kasus penipuan	NA	NA	NA	1	1
<b>7</b>	Jumlah kasus pemalsuan uang	NA	NA	NA	0	0
<b>8</b>	Kekerasan anak dan KDRT	NA	NA	NA	3	4
<b>9</b>	Perjudian	NA	NA	NA	4	2
<b>10</b>	Jumlah tindak kriminal selama 1 tahun	NA	NA	NA	24	21
<b>11</b>	Jumlah penduduk	NA	NA	NA	90.567	90.567
<b>12</b>	Angka kriminalitas (10)/(11)	NA	NA	NA	2,6	2,3

## 2. Perlindungan Masyarakat (Linmas).

Terkait dengan keberadaan anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kecamatan Sukolilo dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel II.13**  
**Jumlah LINMAS**

No	Desa	Linmas		
		Aktif	Tidak Aktif	Jumlah
1	Prawoto	22	20	42
2	Pakem	10	8	18
3	Wegil	11	10	21
4	Kuwawur	10	8	18
5	Baleadi	15	10	25
6	Wotan	20	9	29
7	Kedungwinong	10	9	19
8	Porangparing	6	6	12
9	Sukolilo	20	20	40
10	Baturejo	22	18	40
11	Gadudero	10	6	16
12	Sumbersoko	10	5	15
13	Tompegunung	12	9	21
14	Kedumulyo	15	13	28
15	Kasiyan	6	4	10
16	Cengkalsewu	10	5	15
<b>Jumlah</b>		<b>209</b>	<b>160</b>	<b>369</b>

Evaluasi capaian kinerja pelayanan kecamatan Sukolilo periode 2012-2017 sebagai berikut.

**Tabel II.14**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati**  
**Tahun 2013-2017**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Angka Kriminalitas		3,2		4,0	3,8	3,6	3,4	3,2	3,5	3,4	3,2	2,6		0,8	0,8	0,8	0,9	0,8
2	Jumlah pos kamplang aktif dibagi jumlah pos kamplang yang ada x 100%		60		40	45	50	55	60	40	45	50	50	52	1	1	1	0,9	0,8
3	Jumlah anggota Linmas aktif dibagi jumlah anggota Linmas yang ada x 100%		60		40	45	50	55	60	25	30	35	46	53	0,6	0,6	0,7	0,8	0,8
4	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berprestasi		60		40	45	50	55	60	32	33	35	38	40	0,8	0,7	0,6	0,7	1
5	Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat		100		80	85	90	95	100	80	84	88	95	100	1	0,9	0,9	1	1
6	Persentase usulan masyarakat yang masuk dalam APBD Kabupaten		6		4	4	5	5	6	4	4	4	4	4	1	0,8	0,8	0,8	0,6
7	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif		60		40	45	50	55	60	30	32	33	35	36	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
8	Persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.		100		75	80	85	90	100	75	80	85	90	100	1	1	1	1	1
9	Persentase usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten		6		3	4	5	6	6	3	4	4	4	4	1	1	0.8	0.6	0.6
10	Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan		80		60	65	70	75	80	60	65	68	75	78	1	1	0.9	1	0.9
11	Persentase Realisasi Capaian RKPDes		80		60	65	70	75	80	60	62	68	74	75	1	0.9	0.9	0.9	0.9
12	Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu		100		75	80	85	90	100	75	80	85	90	100	1	1	1	1	1
13	Persentase pelayanan perijinan tepat waktu		100		75	80	85	90	100	73	76	83	89	95	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
14	Persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan		80		60	65	70	75	80	60	64	69	75	79	1	0.9	0.9	1	0.9
15	Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib		90		70	75	80	85	90	70	75	78	80	88	1	1	0.9	0.9	0.9

### **2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan**

Untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Kecamatan Sukolilo sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan di samping juga sumber daya manusia dan sarana prasarana. Pada tahun 2016 anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Sukolilo sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.15

**Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan  
di Kecamatan Sukolilo tahun 2013-2017**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (dlm Ribuan)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (dlm Ribuan)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	120.000	132.000	145.200	159.720	175.692	132.596	133.575	170.431	228.479	292.565	1,10	1,01	1,17	1,43	1,67	10,00	22,46
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apratur	50.500	55.550	61.105	67.216	73.937	43.251	44.921	221.280	116.881	114.617	0,86	0,81	3,62	1,74	1,55	10,00	74,99
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	6.000	6.600	7.260	7.986	8.785	8.400	8.910	16.200	8.400	10.800	1,40	1,35	2,23	1,05	1,23	10,00	-6,25
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	1.100	1.210	1.331	1.464	1.611	5.190	4.835	1.080	5.980	7.451	4,72	4,00	0,81	4,08	4,63	10,00	62,03

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (dlm Ribuan)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (dlm Ribuan)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
dan Keuangan																	
Program Penataan Administrasi Kependudukan	81.080	86.654	96.759	106.685	117.404	82.720	51.480	52.238	46.184	2.431	1,02	0,59	0,54	0,43	0,02	9,71	-20,32
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	13.200	14.520	15.972	17.569	19.326	-	-	9.905	3.095	3.207	0,00	0,00	0,62	0,18	0,17	10,00	#DIV/0!
Program Pemeliharaan Kanrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	20.000	20.500	22.550	24.805	27.286	19.652	17.540	22.120	19.450	25.436	0,98	0,86	0,98	0,78	0,93	#DIV/0!	#DIV/0!
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	20.000	20.500	22.550	24.805	27.286	19.652	17.540	22.120	19.450	25.436	0,98	0,86	0,98	0,78	0,93	8,12	8,15

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (dlm Ribuan)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (dlm Ribuan)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggar an	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial	3.400	3.500	3.850	4.235	4.659	3.028	3.881	3.462	3.192	3.268	0,89	1,11	0,90	0,75	0,70	8,23	2,78
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	28.500	29.500	32.450	35.695	-	28.065	21.016	15.836	3.063	#DIV/0!	0,98	0,71	0,49	0,09	#DIV/0!	#DIV/0!
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	15.500	16.800	18.680	20.148	21.713	13.321	10.470	11.895	5.554	5.968	0,86	0,62	0,64	0,28	0,27	8,80	-14,37
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan	5.850	6.435	7.079	7.786	8.565	8.760	8.704	24.755	22.065	16.479	1,50	1,35	3,50	2,83	1,92	10,00	32,94

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (dlm Ribuan)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (dlm Ribuan)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	-	1.400	1.540	1.694	1.863	-	-	4.215	2.845	3.063	#DIV/0!	0,00	2,74	1,68	1,64	#DIV/0!	#DIV/0!
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	10.800	11.030	12.133	13.346	14.681	10.027	13.194	13.924	14.256	14.900	0,93	1,20	1,15	1,07	1,01	8,02	10,89
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan dan Pelayanan Publik	-	63.000	65.000	20.000	21.000	-	62.540	19.860	4.015	9.686	#DIV/0!	0,99	0,31	0,20	0,46	#DIV/0!	#DIV/0!

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Sukolilo**

Tantangan pengembangan pelayanan kecamatan Sukolilo merujuk pada tugas fungsi utama kecamatan yaitu koordinasi (i) penyelenggaraan pemerintahan, (ii) pelayanan publik, dan (iii) pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan.

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Sukolilo kurun 2012-2017, maka tantangan pengembangan ke arah lima tahun yang akan datang (2017-2022) seagai berikut.

1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban.

Tantangan dalam memberikan rasa aman dalam hal ini menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui pengembangan keikutsertaan masyarakat dalam menjaga lingkungannya. Keberadaan lembaga posko keamanan lingkungan (Poskamling) yang selama ini sudah ada memerlukan upaya untuk mengembalikan peran dan fungsinya untuk ikut serta dalam menjaga ketentraman dan ketertiban. Selain itu keberadaan tenaga perlindungan masyarakat (Linmas) dapat dimanfaatkan untuk ikut serta dalam menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan.

2. Koordinasi bidang fungsi Penyelenggaraan Pemerintahan

Tantangan ke depan adalah implementasi teknologi informasi untuk penyelenggaraan pemerintahan di era keterbukaan informasi, maka tantangan pengembangannya adalah bagaimana kecamatan menguatkan fasilitasi dan koordinasi lintas pelaku untuk menyediakan data sektoral kewilayahan yang akurat dan terbaru.

Peluang pengembangan ke depan perlu diprioritaskan optimalisasi pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat. Oleh karena itu tantangan sekaligus peluang pengembangannya adalah peningkatan kualifikasi sumber daya aparatur kecamatan.

3. Pelayanan Publik

Tantangan pembangunan nasional dalam RPJMN dimana seluruh daerah di Indonesia diprogramkan bergerak ke arah *Smart City* memberi tantangan khusus bagi kecamatan untuk menyelenggarakan pelayanan publik berbasis teknologi informasi menuju smart kecamatan (Kecamatan cerdas). Fokus pengembangan pelayanan kurun lima tahun

ke depan adalah menuju kecamatan berstandar ISO untuk pelayanan publik.

4. Pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan

Tantangan dari RPJMN 2014-2019 adalah bagaimana menguatkan partisipasi masyarakat menuju tata kelola pemerintahan yang demokratis dan menguatkan kemandirian wilayah. Tantangan pengembangan layanan kecamatan kurun 2017-2022 lebih memerlukan fokus pengembangan dalam hal isu:

- a. Partisipasi masyarakat untuk menjaga pengendalian kualitas dan kuantitas sumber lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kegiatan rumah tangga dan kegiatan usaha.
- b. Partisipasi masyarakat untuk memenuhi rasio kebutuhan sarana sanitasi lingkungan untuk mengurangi resiko dampak kesehatan dikarenakan lingkungan pemukiman yang tidak sehat.